

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *GENERAL CONSENT* DI RSUD H.DAMANHURI BARABAI

Fauzan Rozali¹, Noorhidayah²,Edi Ariyanto³

Kesehatan Masyarakat,13201, Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NPM18070465

Kesehatan Masyarakat,13201, Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1123117401

Kesehatan Masyarakat,13201, Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1122028802

E-mail: fauzan.rizsyafa@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menghormati Hak pasien dan Keluarga dalam pengambilan keputusan dan hak informasi, Di RSUD H.Damanhuri Barabai telah mengimplementasikan kebijakan *general consent*, namun pada pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih ditemui petugas yang belum menjalankan kebijakan pengisian *general consent*, serta keluarga yang tidak mengetahui tentang isi dan tujuan pengisian *general consent* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan *general consent*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi serta pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *general consent* belum maksimal dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pada komponen input komunikasi menunjukkan bahwa kurangnya monitoring dan evaluasi oleh pemangku kebijakan, dari komponen sumber daya pada saat banyaknya kunjungan pasien rawat inap pengisian *general consent* tidak dapat dilakukan dengan maksimal sedangkan pada pendaftaran rawat jalan belum mengimplementasikan kebijakan *general consent* ini, dari komponen struktur birokrasi didapati bahwa distribusi standar operasional prosedur (SOP) hanya disampaikan secara lisan pada rapat sehingga belum diketahui oleh petugas sebagai implementor secara detail dan dari komponen disposisi pelaksana didapati pasien atau keluarga pasien hanya disuruh membaca dan langsung diminta tanda tangan. Disarankan kepada rumah sakit untuk kembali melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait standar operasional prosedur *general consent*, mencari metode baru dalam penyampaian dan pengisian formulir *general consent*, agar pasien dan keluarga dapat memahami dan ikut mengimplementasikan serta mengaplikasikan isi *general consent* dengan baik

Kata Kunci : *General Consent*; Implementasi Kebijakan;Rumah Sakit

ABSTRACT

To respect the rights of patients and families in decision-making and information rights, the H.Damanhuri Barabai Hospital has implemented a general consent policy, but the implementation is still not optimal because there are still officers who have not carried out the general consent filling policy, and families who do not know about the contents and the purpose of filling out the general consent. This study aims to analyze the implementation of general consent policies. This type of research is descriptive qualitative research with interview and observation data collection techniques as well as interview guidelines. The results of the study indicate that the implementation of general consent has not been maximized and there are still obstacles in its implementation. In the communication input component, it shows that there is a lack of monitoring and evaluation by policy makers, from the resource component when there are many inpatient visits, filling out general consent cannot be carried out optimally, while outpatient registration has not implemented this general consent policy, from the bureaucratic structure component it is found that the distribution of standard operating procedures (SOPs) was only conveyed orally at the meeting so that the officer

as the implementer was not aware in detail and from the executor's disposition component it was found that the patient or the patient's family was only told to read and immediately asked to sign. It is suggested to the hospital to re-demonstrate and evaluate related standard operating procedures for general consent, look for new methods in submitting and filling out general consent forms, so that patients and their families can understand and participate in implementing and applying the contents of general consent properly.

Keywords :General Consent ;Policy Implementation ;Hospital

REFERENSI

- Abdoellah, A. Y. & Rusfiana, Y., 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. I ed. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, N., Nuraini, N. & Wicaksono, A. P., 2020. *Analisis penyebab ketidaksesuaian spo pengisian general consent di rumah sakit universitas airlangga*. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan* , Volume 1, pp. 328-336.
- Ardinata, M., 2020. *Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia*. *Jurnal HAM*, Volume 11, pp. 319-333.
- Azizah,Hani.& Budi, Savitri Citra,2017.*Hubungan Karakteristik Individu Dengan Tingkat Pemahaman Pasien Atau Keluarga Pasien Terkait Persetujuan Umum Di Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*. Prosiding Seminar Rekam Medis Dan Manajemen Informasi Kesehatan.DPD Pormiki Jawa Tengah.
- Departemen Pendidikan Nasional.,2008.*Kamus Bahasa Indonesia*.Jakarta
- D.K, B. D., Alfiasnyah, G. & Farlinda, S., 2020. *Tinjauan Pelaksanaan General Consent Pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr.Sardjito*. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan* , Volume 1, pp. 320-327.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Iswanti, D. S., Handoyo, M. D. & Khoitunnisa, R., 2021. *Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir General Consent Rawat Jalan terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS pada Elemen Penilaian HPK 5 di RSUD dr. Soedirman Kebumen*. *Politeknik Piksi Ganessa* , Volume 5, pp. 6743-6748 .
- Kementerian Kesehatan RI.,*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269.,2008.Tentang Rekam Medis*.
- ,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12., 2020. *Akreditasi Rumah Sakit*, Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- ,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3., Tahun 2020. *Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*, s.l.: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Karyaningsih, P. D., 2018. *Ilmu Komunikasi*. Cetakan I ed. Yogyakarta: Samudra Biru .
- Ningsih,K.P.,Mahbubah.Z.S.,2021. *Analisis Desain Formulir General Consent Rawat Inap (Studi Kasus di Lab RMIK Unjaya)*. *Indonesian of Health Information Management Journal*,Volume 9,pp.38-46
- Nugrahani, F., 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Surakarta: Cakra books.
- Nursalim, 2017. *Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh unit pelaksana teknis pasar cikatomas dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2017*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 5, pp. 117-126.
- Profil RSUD H.Damanhuri Barabai,2022.

- Pradono, J., Rachmalina, S. & Kusumawardani, N., 2018. *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan .
- Moleong, L.J., 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- , 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mayasari, N., 2020. *Sosialisasi Pengetahuan Tentang Nilai Guna Rekam Medis Bagi Tenaga Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Selaguri Padang*. *Journal of Community Engagement in Health*. Vol.3. pp.335-338
- Purwanti, I. S., Prihatiningsih, D. & Devhy, N. L. P., 2020. Studi Deskriptif Kelengkapan Dokumen Rekam Medis. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan* , Volume 3, pp. 36-40.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, 2021. Tentang Penyelenggaraan bidang perumahsakit.
- Rachmawati, W. C., 2019. *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Malang: Wineka Media .
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant.
- Sutopo, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Sutoto, 2018. *Overview Snars Edisi 1.1*, Jakarta: Komite Akreditasi Rumah Sakit.
- Tachjan, 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan 1 ed. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39, Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia.
- Nomor 44, Tahun 2009. Tentang *Rumah Sakit*
- Nomor 36, Tahun 2009. Tentang *Kesehatan*
- Widjaya, L., Rosmaladewi, D., 2017. *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Manajemen Informasi Kesehatan II : Sistem dan Subsistem Pelayanan RMIK*: Cetakan 1. Jakarta